

**PERAN PEMERINTAH DESA MENINGKATKAN PENGAWASAN MASYARAKAT
DALAM PEMBANGUNAN DI DESA MAMUYA
KECAMATAN GALELA**

**Oleh
BUDIMAN DJOMA
080813114**

Abstrak

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan Pemerintah Daerah yang berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab serta upaya penyelamatan normalisasi kehidupan Birokrasi sesuai dengan tuntutan reformasi yang diperlukan adalah kesamaan Visi, prespsi dari seluruh penyelenggara Pemerintah dan Masyarakat.

Untuk mewujudkan pengawasan masyarakat yang seperti diharapkan oleh demokrasi dan masyarakat madani menuju Pemerintahan Desa Mamuya yang mandiri, tentunya membutuhkan peran pemerintah yang benar-benar potensial, baik dari sisi sumberdaya manusia, menjunjung tinggi efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pengawasan masyarakat, sehingga pada kualitas seperti ini nantinya diharapkan mampu berinovasi dan bersinergi dalam memilih dan menentukan kemana kiblata pembangunan pemerintah dan daerah khususnya desa berpijak. Berangkat dari perencanaan seperti itu justru dinilai semakin baik, namun paling terpenting tentunya diharapkan menyatu dan berkarakter dalam bentuk tugas, alasannya adalah karena tugas merupakan salah satu pelaksanaan yang diberikan oleh atasan atau yang memerintah kepada bawahan. Berangkat dari tugas yang benar-benar terkonseptual dan rekonstruktif maka dapat dijamin melalui pengawal pembangunan bisa terwujud secara efektif dan efisien sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

Pemerintah Desa Mamuya Kecamatan Galela sering melibatkan masyarakat desa dalam kegiatan-kegiatan program yang bertujuan untuk membangun desa, peran pemerintah berkaitan

dengan pembangunan selalu melibatkan masyarakat, ketelibatan masyarakat mulai dari perencanaan program, pelaksanaan maupun sampai pada pengawasannya.

(Key Words :Pemerintah Desa, Pengawasan, Masyarakat, Pembangunan)

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Untuk mewujudkan pengawasan masyarakat yang seperti diharapkan oleh demokrasi dan masyarakat madani menuju Pemerintahan Desa Mamuya yang mandiri, tentunya membutuhkan peran pemerintah yang benar-benar potensial, baik dari sisi sumberdaya manusia, menjunjung tinggi efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pengawasan masyarakat, sehingga pada kualitas seperti ini nantinya diharapkan mampu berinovasi dan bersinergi dalam memilih dan menentukan kemandirian pembangunan pemerintah dan daerah khususnya desa berpijak. Berangkat dari tugas yang benar-benar terkonseptual dan rekonstruktif maka dapat dijamin melalui pengawal pembangunan bisa terwujud secara efektif dan efisien sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

Kita memahami bahwa pembangunan dibutuhkan untuk memecahkan berbagai masalah seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan pengangguran. Namun pemahaman demikian tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa adanya kritik maupun kontrol terhadapnya, karena pada prinsip kehadiran pembangunan yang di asumsi semula sebagai satu-satunya cara untuk memecahkan masalah seperti yang sudah disebutkan diatas dapat berbalik fakta, seperti adanya kesenjangan sosial ekonomi, politik dan kebudayaan.

Bertitik tolak dari permasalahan diatas, dibutuhkan keterlibatan aktif dan keseriusan pemerintah setempat, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan yang termasuk didalamnya pemerintah desa. Dalam memainkan perannya apabila pembangunan itu lebih diarahkan pada pembangunan didesa, dalam proses penanggulangannya Kepala Desa harus berperan aktif dan melaksanakan secara menyeluruh pelaksanaan pembangunan yang didasari pada peraturan perundang-undangan, atau pun melalui peraturan daerah yang akan dikeluarkan maupun yang akan dijalankan. Sedangkan masyarakat sendiri yang akan diposisikan untuk menilainya apakah peran kepala desa dapat mendorong mereka untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan tersebut.

Menurut pengamatan penulis di desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara telah ada beberapa program pembangunan baik fisik maupun non fisik telah ada seperti pembangunan pagar desa, pembangunan pos penjagaan potensi desa (Galian C) serta pembangunan non fisik pembinaan generasi muda dan lain-lain yang ada hubungannya dengan pembangunan non fisik. Namun pelaksanaannya belum maksimal dan terkesan lambat. Peran pemerintah desa sampai saat ini dirasakan masih kurang, hal ini berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam pembangunan pagar desa yang dianggap masih kurang adanya kerjasama antara aparat pemerintah dengan masyarakat. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk meneliti tentang masalah “*Peran Pemerintah Desa Meningkatkan Pengawasan Masyarakat dalam Pembangunan Di Desa Mamuya Kecamatan Galela*”.

2. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa pengawasan masyarakat dalam pembangunan di desa mamuya kecamatan galela kabupaten Halmahera utara.

3. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat yaitu :

- a. Dapat memberikan suatu bahan masukan kepada pemerintah desa di Desa Mamuya Kecamatan Galela kabupaten Halmahera utara.
- b. Menjadi bahan informasi ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi pihak yang membacanya.

B. Hasil Dan Pembahasan

a. Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan

Kegiatan pembangunan nasional dengan segala ukuran keberhasilan dan dampak positif dan negatifnya, tidak terlepas dari kerja keras dan pengabdian aparat pemerintah desa. Aparat pemerintah yang ada di desa dan juga sebagai pemimpin serta penanggung jawab pembangunan harus memiliki tanggung jawab atas perubahan-perubahan yang akan terjadi, baik perubahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat maupun perubahan sosial masyarakat. Seiring dengan perkembangan dewasa ini, maka masyarakat semakin kritis dengan adanya era globalisasi dimana ilmu pengetahuan serta teknologi serta seni yang kian pesat perkembangannya sehingga mendorong aparat pemerintah yang dinamis dalam setiap bidang kerja dilakukan agar mudah untuk dilakukan.

Pemerintah desa mamuya kecamatan Galela sering melibatkan masyarakat desa dalam kegiatan-kegiatan program yang bertujuan untuk membangun desa, peran pemerintah berkaitan dengan pembangunan selalu melibatkan masyarakat, ketelibatan masyarakat mulai dari perencanaan program, pelaksanaan maupun sampai pada pengawasannya. Seperti yang dituturkan oleh Kepala Desa Mamuya yang berindisial LJ beliau mengatakan “ *dalam pelaksanaan kegiatan atau program didesa masyarakat sering dilibatkan,mulai dari awal perencanaan program, tidak hanya dalam pelaksanaan sampai pada pengawasan dan evaluasi.*

Selanjutnya menurut SB, Sekretaris Desa Mamuya beliau mengatakan “ *dalam perencanaan program, selalu dilibatkan baik dalam MSREMBANG (musyawarah perencanaan pembangunan) yang rutin dilakukan setiap tahun atau pun dalam pertemuan- pertemuan atau rapat yang sering dilakukan oleh pemerintahn desa untuk membicarakan setiapa pembangunan yang akan dilaksanakan didesa”.*

Melihat hasil penelitian dan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah berperan penting dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam musrembang. Hal ini disebabkan karena melihat tingkat partisipasi masyarakat untuk hadir dan turut menyampai ide-ide dan gagasan mereka dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan di desa.

Jika dilihat dari partisipasi masyakat dalam kegiatan musrembang maka dapat dikatakan peran pemerintah tergolong tinggi dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Menurut Bapak NJ, masyarakat desa mamuya beliau mengatakan :”*masyarakat sudah cukup banyak yang berpartisipasi dalam acara musrembang, tapi masalahnya justru berada di kalangan pemerintah desa yang kurang koordinasi.*”

Melihat pendapat dari salah seorang masyarakat maka dapat di simpulkan bahwa tidak semua pemerintah desa yang berperan dalam mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan,hal ini sebabkan karena hanya sebagian dari mereka saja yang mempublikasikan kepada masyarakat untuk hadir dalam acara musrembang dan sebagiannya lagi tidak ikut mempublikasikan kepada masyarakat.

Dengan demikian, untuk memperoleh partisipasi secara aktif dari masyarakat tentunya tidak terlepas dari peranan pemerintah yang ada didesa Mamuya agar pembangunan yang dilaksanakan di desa berjalan secara baik.

b. Program Pembangunan Pemerintah Desa Mamuya Dan Bentuk Patisipasi Masyarakat

Pada dasarnya pembangunan baik itu pembangunan fisik maupun non fisik dapat berhasil ketika ada kerjasama antara Pemerintah dan Masyarakat, kerja sama ini dimulai dengan yang namanya perencanaan program pembangunan, pelaksanaan program, pengawasan sampai kepada evaluasi.

Adapun program-program yang dilakukan oleh pemerintah desa Mamuya Menurut Sekertaris Desa diantaranya adalah pemabangun Pusat Kesehatan Masyrakat (Puskesmas), Pemabangunan Balai Desa, Pagar Desa, Penyuluhan Pendidikan pelatihan untuk Perempuan yang dilakukan oleh PKK, Serta Pendidikan dan pelatihan untuk pemuda yang ada didesa.

Selanjutnya dalam program pembangunan fisik pemerintah melibatkan masyarakat dimulai dengan dalam perencanaan program beserta anggaran dimana masyarakat diundang untuk berpartisipasi untuk membicarakan program pembangunan fisik beserta anggaran yang dibutuhkan.

Dalam membangun proses demokrasi didesa maka diperlukan relasi antara desa dan kekuatan diluar. Karna pokok persoalannya adalah apapun usaha yang dilakukan kalau desa tetap menjadi subordinasi dari kekuatan diatasnya, maka perubahan tidak akan pernah diwujudkan. Sebaiknya desa sebagai basis masyarakat mayoritas apabila tidak bisa ditransformasikan menjadi kekuatan demokrasi, maka akan sulit untuk membangun proses demokrasi dalam subtansi yang utuh.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukan bahwa dari peranan pemerintah desa meningkatkan pengawasan masyarakat dalam pembangunan, adapun bentuk –bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat yaitu berupa partisipasi berupa tenaga, ide-ide atau pemikiran, partisipasi dalam bentuk harta benda (uang), bahan material, dan partisipasi dalam bentuk pemeliharaan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, dapat dikatakan tinggi tingkat partisipasinya, hal ini berdasarkan hasil penelitian kepada semua informan.

Adapun wawancara yang dilakukan kepada masyarakat salah satunya adalah yang ber indisial BY yang berpendapat demikian “*bahwa bentuk partisipasi masyarakat sudah baik saya lihat sudah banyak yang memberikan bantuan kepada pemerintah untuk mendukung pembangunan yang ada di desa mamuya ini. Tapi saya melihat belum sepenuhnya masyarakat*

yang mendukung dengan saya salah satu masyarakat yang membrikan bantuan tenaga pada waktu pemerintah desa mengadakan program pembuatan bagar desa.

Jika dilihat dari partisipasi masyarakat dalam bentuk partisipasi ide-ide atau pemikiran yang masyarakat berikan untuk menyukseskan pembangunan didesa tergolong tinggi.

Menurut TM selaku ketua RT 02 beliau mengatakan :*”kalau mau kasih ide, maka sudah banyak ide yang diberikan masyarakat sehingga saya juga pusing ide ide mana yang harus digunakan. Saya sebagai ketua RT hanya memberikan saran kepada atasan saya yakni ketua dusun.*

Menurut bapak SW saat diwawancara beliau mangatakan :*”mereka sudah sering memberikan bantuan lewat sumbangan kerja buruh untuk pembangunan pagar desa.* Begitu juga dengan bapak HS, beliau mengutarakan senada dengan bapak SW diatas, dimana beliau sudah sering meberikan bantuan pada pemerintah berupa uang contohnya dalam sumbangan untuk buru pekerja pembangunan pagar desa.

Menurut MT Bendahara desa mamuya saat diwawancara beliau mengatakan :*”ada juga yang memberikan bantuan berupa semen, ada juga yang mau memberi taukan identitas pemberi dan ada juga yang tidak mau disebutkan identitasnya sebagai pemberi sumbangan.* Berdasarkan penjelasan dari kaur pembangunan dan tingkat jawaban informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sudah banyak masyarakat berpartisipasi lewat sumbangan material, ini disebabkan karena melihat dari tingkat partisipasi yang sudah masyarakat berikan. Maka masyarakat sudah berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil diatas menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dikatakan tinggi karena masyarakat sudah bisa menyadari dan mengerti akan pentingnya pembangunan.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat dalam melibatkan diri secara aktif dalam menyukseskan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan didesa Mamuya adalah dalam bentuk tenaga karena masyarakat didesa mamuya dikenal dengan sifat yang gotong royong atau kerjasama sedangkan partisipasi dalam bentuk lainnya seperti yang sudah dijelaskan diatas, hanya mereka yang mempunyai kelebihan harta benda (uang).

c. Bentuk Pengawasan Masyarakat Desa Mamuya Dalam Pembangunan

Negara indonesia adalah negara demokrasi. Dalam negara demokrasi yang berdaulat adalah rakyat. Artinya rakyatlah yang memegang kedaulatan negara, bukan presiden/kapala negara. Karena rakyat yang memegang kedaulatan maka rakyat juga yang mengatur segala

urusan negara. Akan tetapi, karena rakyat Indonesia jumlahnya lebih dari 258 juta maka tidak mungkin rakyat ramai-ramai mengatur segala urusan negara. Untuk itu dibuat sistem perwakilan Rakyat memilih wakil yang dipercaya untuk duduk dalam lembaga perwakilan (MPR, DPR, DPD Dan DPRD) dengan tugas utama mewakili rakyat dalam menyelenggarakan sebagian kedaulatan rakyat.

Terdapat dua bentuk pengawasan kegiatan pemerintahan. Pertama, pengawasan formal, kedua, pengawasan informal, pengawasan formal adalah pengawasan masyarakat yang disalurkan perwakilan (MPR dan DPR/DPRD). Sedangkan pengawasan informal adalah pengawasan masyarakat yang disalurkan dari nonperwakilan rakyat, seperti melalui organisasi buruh SPSI, SBSI, dan GASBINDO, melalui organisasi kemasyarakatan seperti NU, Muhammadiyah, KNPI, Kowani, dan HKTI melalui organisasi profesi seperti IDI, PGRI dan APII, melalui LSM, melalui cendekiawan dan/ mahasiswa dan melalui pers.

Bentuk pengawasan masyarakat kepada pemerintah dapat dalam bentuk melembaga dan tidak melembaga. Pengawasan melembaga yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara-cara terlembaga, seperti temu wicara, petisi, pernyataan sikap, rekomendasi, resolusi dan demonstrasi damai. Sedangkan pengawasan yang tidak melembaga, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan cara yang tidak terlembaga misalnya misalnya demonstrasi liar, penyebaran pamflet-pamflet yang tidak sopan, cacik, pemogokan umum, pemboikotan, pembangkangan, sabotase dan perusakan.

Bentuk pengawasan masyarakat di desa Mamuya sudah dimulai sejak awal program disusun. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui program apa saja dan berapa anggaran yang dibutuhkan berkaitan dengan pelaksanaan program yang akan dilakukan di desa. Dalam tahapan pelaksanaan program selain mengawasi, masyarakat pun diajak untuk terlibat aktif baik tenaga maupun dalam hal pengawasan.

Berhubungan dengan pengawasan masyarakat, bentuknya seperti ketika masyarakat menemukan adanya permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan, maka masyarakat tidak menggunakan cara-cara yang kurang baik seperti yang dijelaskan dalam pengawasan tidak melembaga (pengawasan Informal), tetapi masyarakat bersama-sama dengan pemerintah desa untuk duduk bersama membicarakan tentang pelaksanaan pembangunan yang mengalami kendala tersebut.

Hal ini seperti di utarakan oleh bapak SS, masyarakat desa mamuya “ *kalau ada masalah dalam pekerjaan pelaksanaan pembangunan biasanya kami sering diajak oleh pemerintah desa untuk bersama-sama untuk memecahkan masalah yang dihadapi tersebut*”

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat tidak hanya sampai pada penentuan program tetapi juga sampai tahap pengawasan, hal ini dilakukan oleh pemerintah desa Mamuya dalam rangka terlaksananya pembangunan di didesa.

Walaupun pada dasarnya ada juga ditemukan beberapa kendala dalam pembangunan di desa Mamuya. Diantaranya :

1. Kesadaran Masyarakat

Tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan memang dapat dikatakan relatif karena dalam setiap perencanaan untuk melaksanakan pembangunan, maka masyarakat tidak dengan sendirinya untuk dapat berpartisipasi aktif tetapi selalu harus melalui paksaan atau panggilan langsung dari aparat pemerintah desa. Inti terbukti waktu penulis mengadakan penelitian lapangan, masyarakat mau berpartisipasi penuh kalau ada pemberitahuan atau panggilan dari pemerintah desa yang ada didesa Mamuya.

2. Kurang Aktifnya Aparat Pemetintah

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah Desa Mamuya harus berperan aktif dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk melayani dan memotivasi masyarakat sebagai mana yang sudah dujelaskan sebelumnya. Disini penulis dapatkan bahwa kinerja dari aparat desa Mamuya belum bisa dikatakan sudah sepenuhnya baik karena dari pemerintah sendiri kurang koordinasi antara satu dengan yang lain.

3. Sikap Mental Masyarakat

Dalam menyukseskan setiap gerakan pembangunan yang akan dilaksanakan, maka sikap mental dari masyarakat perlu dijaga bersama. Sikap mental yang dimaksud disini adalah dalam berbuat, bertindak maupun dalam menjaga hasil-hasil pembangunan. Untuk itu dalam menunjang keberhasilan dalam suatu kepemimpinan dari pemerintah yang bersangkutan, maka bagaiman pemerintah dalam mengembangkann sikap mental yang dimiliki oleh masyarakat tersebut agar mereka selalu berpartisipasi aktif dalam setiap pembangunan.

C. PENUTUP

a. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah desa mamuya selalu melibatkan masyarakat tidak hanya dalam perencanaan program pembangunan saja tetapi dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Walaupun kadangkala ditemukan ada tumpang tindih informasi di antara aparat dan dari aparat ke masyarakat.
2. Program didesa Mamuya sebagian besar berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya partisipasi sebagian besar masyarakat di desa yang ada di desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun pada tahapan pengawasan dan evaluasi.
3. Pengawasan masyarakat di desa mamuya berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan pemerintah desa memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya pembangunan di desa.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah selaku aparat pemerintah yang ada di desa Mamuya, antara lain :

1. Pembangunan akan berhasil ketika adanya koordinasi diantara pemerintah desa dengan masyarakat. Oleh karena koordinasi antara aparat pemerintah Desa harus terus dilakukan agar terjadi tumpang tindih informasi.
2. Masyarakat harus diberikan ruang untuk berpartisipasi agar pembangunan di desa dapat terlaksana dengan baik.
3. Pengawasan dalam pembangunan harus terus ada agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- HAW. Widjaja, 2008. *Otonomi Desa*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- H. Abu Ahmadi, 2009, *Ilmu Sosial Dasar*, PT. Rineka Cipta Jakarta
- Huda, 2007. *Pengawasan pusat terhadap daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah*.
FH UII PRESS.
- Ndraha, Taliziduhu, *Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Yayasan Karya Dharma, Jakarta, 1985.

- Maleong, Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. PT. Rafika Aditama: Bandung.
- Nurcholis, 2007. *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Rusdiyanta, Syarbaini, Syahrial, 2009, *Dasar-dasar Sosiologi*, Graha Ilmu Yogyakarta
- Sedarmayanti, 2007. *Good Governance dan Good Corporate Governance*
CV. Mandar Maju. Bandung
- Syahyuti, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Sugiyono. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif ,Kuantitatif R&D*. PT Alfabeta: Bandung
- Soerjono Soekanto, 1998, *Pengantar Sosiologi*, Obor Indonesia Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2007, *Sosiologi suatu Pengantar*, PT. Raja Gtafindo, Jakarta
- S.P.Siagian, Administrasi Pembangunan, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1987. Soetardjo, Perkembangan Desa, 1984.
- Tjokroamidjojo, Bintaro, Manajemen Pembangunan, Haji Masagung, Jakarta, 1991

SUMBER LAIN :

- Keputusan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- UU. RI nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
- Peraturan Desa No 1 Tahun 2008 Tentang Sumber Pendapatan Desa Mamuya
- Peraturan Desa No 2 Tahun 2008 Tentang Jenis- jenis Pendapatan Dan Besaran Pendapatan Desa Mamuya.
- itjen-depdagri.go.id/article-25-pengertian-pengawasan.html*
- ([http://niasbarat.wordpress.com/2007/12/19/pengertian etika peranan-sangat-sulit-dengan-lahirnya-2007/](http://niasbarat.wordpress.com/2007/12/19/pengertian_etika_peranan-sangat-sulit-dengan-lahirnya-2007/))
- (<http://www.damantiri.or.id/file/suwandiunarbab21.pdf>)